

Teori Konvergensi dan Liberalisasi Ekonomi

July 17, 2008 – 7:03 am

Dalam ilmu ekonomi, teori konvergensi menyatakan bahwa tingkat kemakmuran yang dialami oleh negara-negara maju dan negara-negara berkembang pada suatu saat akan konvergen (bertemu di satu titik). Disebutkan bahwa akan terjadi *catching up effect*, yaitu kondisi ketika negara-negara berkembang berhasil “menangkap” negara-negara maju. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa negara-negara maju akan mengalami kondisi steady state, yaitu negara yang tingkat pendapatannya tidak dapat meningkat lagi. Hal ini bisa terjadi karena seluruh biaya produksi sudah tertutupi oleh investasi yang ada, sehingga tambahan tabungan di negara tersebut tidak dapat dijadikan tambahan investasi. Tidak ada tambahan investasi berarti tidak ada tambahan pendapatan.

Sementara itu negara-negara berkembang memiliki tingkat investasi dibawah biaya produksi, sehingga tambahan tabungan di negara tersebut akan dijadikan tambahan investasi dan akhirnya menambah pendapatan negara tersebut. Jadi, sementara negara-negara maju “diam”, negara-negara berkembang terus “mengejar”, sehingga pada suatu saat negara-negara maju pasti akan “tertangkap” oleh negara-negara berkembang. Begitulah kira-kira konsep teori konvergensi. Namun seperti yang kita ketahui, bahwa teori konvergensi tidak terjadi di dunia nyata. Negara-negara berkembang, kecuali Jepang dan beberapa negara yang termasuk asian miracle, tidak pernah mampu “menangkap” negara-negara maju. Bahkan kalau boleh dibilang disparitas pendapatan antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang malah semakin melebar. Ada apa?

Steady State Theory

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penyebab terhentinya pertumbuhan ekonomi negara-negara maju adalah karena seluruh biaya produksi sudah tertutupi oleh investasi yang ada, sehingga tidak ada lagi investasi yang bisa dilakukan. Akibatnya kaum kapitalis di negara-negara maju berusaha mencari tempat baru untuk menginvestasikan modalnya, maka dipilihlah negara-negara berkembang sebagai tempat investasi mereka. Alasannya adalah karena negara berkembang memiliki tipikal perekonomian yang berbeda dengan negara maju. Dengan simplifikasi bahwa hanya ada dua faktor produksi dalam perekonomian, yaitu modal (*capital*) dan tenaga kerja (*labor*), maka bisa kita katakan bahwa negara-negara maju yang memiliki modal melimpah bersifat *capital abundant*, sedangkan negara-negara berkembang yang memiliki tenaga kerja melimpah bersifat *labor abundant*.

Tipikal perekonomian suatu negara (*capital* atau *labor abundant*) akan memengaruhi distribusi pendapatan di negara tersebut. Negara yang bersifat *capital abundant* memiliki rasio modal berbanding tenaga kerja (K/L) yang besar, sehingga *return* atas modal di negara tersebut akan relatif lebih kecil dibanding *return* yang diterima oleh tenaga kerja. Dengan kata lain, di negara yang memiliki modal melimpah harga modal akan turun, sedangkan harga tenaga kerja akan naik. Sebaliknya, di negara yang bersifat *labor abundant*, harga modal relatif lebih mahal dibanding harga tenaga kerja.

Jadi, di negara dengan kondisi *steady state* tambahan tabungan/modal tidak akan berguna lagi karena malah akan memperbesar rasio antara modal dengan tenaga kerja (K/L) sehingga malah menurunkan *return* atas modal. Dengan kata lain kondisi *steady state* adalah neraka bagi kaum kapitalis, karena kondisi itu akan menyebabkan turunnya pendapatan mereka.

Liberalisasi Ekonomi

Namun kaum kapitalis di negara-negara maju berhasil meredam efek *steady state* dengan menggunakan taktik liberalisasi ekonomi. Kondisi *steady state* bisa “dimanipulasi” dengan beberapa cara. Pertama, liberalisasi tenaga kerja. Karena perbedaan tingkat upah, liberalisasi pasar

tenaga kerja akan menyebabkan tenaga kerja mengalir dari negara-negara berkembang menuju negara-negara maju yang pada akhirnya akan menambah jumlah tenaga kerja di negara-negara maju. Dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja maka rasio antara modal dengan tenaga kerja (K/L) akan turun, hal ini berarti keberlimpahan relatif modal atas tenaga kerja juga turun. Jika modal tidak melimpah lagi maka harga modal di negara-negara maju pun akan kembali naik.

Taktik pertama yang menambah jumlah tenaga kerja akan membawa implikasi pada bertambahnya hasil produksi negara-negara maju, sehingga mereka membutuhkan taktik selanjutnya untuk memperluas pasar. Kedua, liberalisasi perdagangan. Dengan WTO sebagai instrumen politiknya, negara-negara maju mengampanyekan *free trade* ke seluruh dunia. Seluruh negara di dunia nantinya diharuskan membuka pasar mereka dan menyerahkan seluruhnya kepada mekanisme pasar bebas. Padahal siapapun tahu bahwa pasar bebas hanya akan menguntungkan produsen yang kuat saja, tapi dengan alasan bahwa hal itu akan lebih menguntungkan buat konsumen maka kita pun menerima perjanjian perdagangan bebas. Mungkin itu karena para pembuat kebijakan di negeri ini telanjur berpendapat bahwa negeri kita ini cuma pasar, sehingga hal apapun yang menguntungkan konsumen pastilah menguntungkan kita juga. Jadi, taktik yang kedua ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari penerapan taktik yang pertama.

Ketiga, liberalisasi sektor finansial. Jika taktik pertama berusaha memperkecil rasio modal berbanding tenaga kerja (K/L) dengan cara menambah jumlah tenaga kerja (L), maka taktik yang ketiga ini berusaha memperkecil rasio itu dengan cara mengurangi jumlah modal (K). Liberalisasi sektor finansial menyebabkan para investor jangka pendek (spekulan) memindahkan modal mereka ke negara-negara yang menawarkan tingkat suku bunga riil yang tinggi. Dengan cara ini maka kelebihan modal yang tidak produktif di negara mereka dapat digunakan untuk menghasilkan uang lagi di negara lain yang memiliki tingkat suku bunga riil tinggi. Hal inilah yang menjelaskan tentang fenomena meningkatnya investasi jangka pendek di Indonesia pada tahun 2006 lalu. Ketika itu suku bunga SBI mencapai 12.75% sedangkan ekspektasi inflasi sekitar 8%, maka ketika itu suku bunga riil yang ditawarkan Indonesia mencapai 4%, salah satu yang tertinggi di dunia.

Keempat, liberalisasi investasi. Jika taktik ketiga menjelaskan tentang investasi jangka pendek (spekulasi), maka taktik yang keempat menjelaskan tentang investasi jangka panjang. Logikanya sama seperti taktik ketiga, bahwa kaum kapitalis berusaha mengurangi modalnya di negara-negara *capital abundant* dan memindahkannya ke negara-negara *labor abundant* yang menawarkan *return* lebih baik, namun kali ini dilakukan dengan cara masuk ke sektor riil. Disahkannya UU Penanaman Modal yang amat liberal itu telah menunjukkan kepada kita betapa kuatnya pengaruh asing dalam proses pengambilan keputusan di Indonesia.

Untuk “menangkap” negara-negara maju, kita memang butuh investasi, tapi apakah artinya jika investasi asing justru mendominasi struktur investasi kita. Bukannya menambah pendapatan kita, penguasaan asing atas sektor-sektor produksi justru akan menambah modal yang dilarikan ke luar negeri setiap tahunnya (repatriasi). Jadi, dengan kondisi dimana liberalisasi ekonomi diterapkan, teori konvergensi mustahil terjadi. Dengan liberalisasi ekonomi, negara-negara maju tidak diam, tapi terus berlari meninggalkan kita. Sementara kita jangankan berlari, berjalan pun akan sulit karena setiap tahunnya akan semakin banyak saja pelarian modal akibat bertambahnya investasi asing. Dengan kondisi seperti ini, jangankan ingin “menangkap” negara-negara maju, bisa melihat dari kejauhan saja pun harusnya kita sudah bersyukur.

Rachmad Satriotomo

Mahasiswa Fakultas Ekonomi UI